

## EFEKTIVITAS PENGELOLAAN DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN FISIK DI DESA BANGKIRAYEN KECAMATAN AWANG KABUPATEN BARITO TIMUR

Melly Pranatal Sistia<sup>1</sup>, Agus Surya Dharma<sup>2</sup>, Arif Budiman<sup>3</sup>

Program Studi Administrasi Publik

Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai

Email : [mellywaweidayak@gmail.com](mailto:mellywaweidayak@gmail.com)

### ABSTRAK

Permasalahan yang ada pada pemanfaatan dana desa diantaranya tidak tepatnya perhitungan biaya penggunaan dana desa, adanya pelaksanaan RKP desa tahun 2022 yang belum terealisasi dan kurangnya pemeliharaan jalan usaha tani. Tujuan penelitian untuk mengetahui efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Fisik di Desa Bangkirayen Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Metode penelitian yang digunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penentuan informan secara Snowball Sampling, teknik analisis yang digunakan adalah reduksi, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Fisik di Desa Bangkirayen kurang efektif. ketepatan waktu meliputi kurang baik, ketepatan perhitungan biaya cukup baik, ketepatan dalam pengukuran kurang baik, ketepatan menentukan pilihan cukup baik, ketepatan berpikir cukup baik, ketepatan menentukan tujuan cukup baik untuk pembangunan infrastruktur, dan ketepatan sasaran kurang baik. Faktor-faktor mempengaruhi meliputi faktor penghambat yakni belum efektifnya perencanaan Pembangunan Fisik Desa, rendahnya sumber daya manusia Aparat Desa dan terbatasnya anggaran, faktor pendorong meliputi kerjasama yang baik antar Aparat Desa dengan Masyarakat dan tingginya partisipasi masyarakat desa.

**Kata kunci:** Efektivitas, Pengelolaan Dana Desa

### ABSTRACT

*Problems that exist in the use of village funds include inaccurate calculation of the cost of using village funds, the implementation of unrealized village RKP in 2022 and lack of maintenance of farm business roads. The purpose of the study was to determine the effectiveness of Village Fund management in Physical Development in Bangkirayen Village, Awang District, East Barito Regency and the factors that influence it. The research method used is a descriptive method with a qualitative approach. Determination of informants by Snowball Sampling, the analysis techniques used are reduction, presentation of data, and drawing conclusions. The results showed that the effectiveness of Village Fund management in Physical Development in Bangkirayen Village was less effective. Timeliness includes poor, cost calculation accuracy is good enough, accuracy in measurement is not good, accuracy in determining choices is good enough, accuracy in thinking is good enough, accuracy in determining goals is good enough for infrastructure development, and target accuracy is not good. Influencing factors include inhibiting factors, namely ineffective Village Physical Development planning, low human resources of Village Officials and limited budget, driving factors include good cooperation between Village Officials and the Community and high participation of village communities.*

**Keywords:** Effectiveness, Village Fund Managemen

### PENDAHULUAN

Menurut Program Pembangunan Nasional (PROPENAS) Nomor 25/2000 Bab IX tentang Program Pembangunan Daerah dan bentuk Undang- Undang yang disahkan oleh Presiden RI pada tanggal 20 november 2000 di Jakarta. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa tujuan dari program pembangunan daerah adalah untuk mengupayakan dukungan pemerintah terhadap jaringan desa, mempercepat kemajuan kegiatan keuangan negara yang netral, mempercepat industrialisasi

desa. Pendapatan masyarakat pedesaan harus meningkat, lapangan kerja harus diciptakan, pangan dan persediaan lainnya harus tersedia untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan produksi, hubungan ekonomi antara pedesaan dan perkotaan harus dibangun, pengelolaan ekonomi lokal harus diperkuat, dan kelembagaan ekonomi masyarakat dan organisasi harus diperkuat.

Dengan semakin banyaknya program dan proyek, serta meningkatnya volume pendanaan dari berbagai departemen dan lembaga nondepartemen, baik bantuan pemerintah pusat dalam bentuk subsidi maupun bantuan pemerintah daerah melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), pemerintah terus fokus pada pembangunan desa. Perdesaan mendapat perhatian mayoritas dari segala bentuk pembangunan, termasuk program sektoral dan regional. Kekuatan fleksibilitas dinamis adalah sumber daya yang signifikan untuk pelaksanaan pergantian peristiwa publik. Oleh karena itu, agar pembangunan desa berhasil, sosok figur pemimpin mutlak diperlukan. Dengan mendorong inisiatif dan menumbuhkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan, kehadirannya sangat penting untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan di daerah masing-masing dan, khususnya, untuk menjamin pemerataan hasil pembangunan sesuai dengan undang-undang tentang pemerintah daerah Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 202. Dalam undang-undang tersebut disebutkan:

1. Pemerintah desa terdiri atas kepala desa dan perangkat desa.
2. Perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya.
3. Sekretaris desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi dari pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan.

Sebagaimana telah dipahami, kegiatan pemerintah dilaksanakan melalui program sektoral dari berbagai divisi departemen dan non-departemen. Dalam perkumpulan ini, pemerintah sesuai peraturan terkait wajib memberikan arahan, arahan, diskusi dan bantuan dalam keterbatasan kemampuan yang ada disertai dengan manajemen yang meningkat dan berkelanjutan. Dukungan daerah yang dikembangkan diakui sebagai dorongan daerah dan partisipasi bersama. Program-program sektoral harus bersinergi, dan masyarakat harus memiliki koneksi dan ketergantungan. Perbaikan kota merupakan perkembangan kemajuan berdasarkan dorongan daerah setempat dan perbaikan diri. Sebab, nyatanya peran aktif pemerintah sebagai pemberi dana pembangunan tidak memungkinkan pembangunan desa. Satu-satunya stimulus yang diberikan pemerintah adalah stimulus yang mendorong kemandirian masyarakat. Oleh karena itu, metodologi dan standar perbaikan kota bersifat ekstensif, terpadu dan tersusun serta unik dan praktis dengan berfokus pada keseimbangan komitmen antara pelaksanaan pemerintah dan pelaksanaan wilayah setempat. Tujuan pembenahan kota adalah untuk menghargai kemajuan kota di seluruh Indonesia.

Dalam jangka panjang, upaya untuk mengkaji kembali konfigurasi siklus politik untuk memberikan ruang yang lebih luas kepada individu mulai terlihat, hal ini ditandai dengan eksekusi dan juga berdampak tegas pada kerangka otoritas publik di Indonesia. Membangun desa memerlukan biaya yang tidak sedikit. Setiap kota di Indonesia diberikan Aset Kota (DD) secara konsisten dalam jumlah tertentu dengan tujuan untuk mengembangkan kota tersebut. Kecuali Dana Alokasi Khusus, Pemerintah Kabupaten mengalokasikan dana kepada Desa yang berasal dari dana bagi hasil pajak daerah, dana bagi hasil retribusi daerah, dan sebagian dana perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah yang diterimanya. Dengan mempertimbangkan aspek pemerataan dan potensi desa yang bersangkutan, maka besaran dana bagi hasil pajak daerah yang diperuntukkan bagi desa minimal sebesar 10% dari penerimaan pajak daerah per tahun. Setidaknya 10% dari pendapatan retribusi daerah disisihkan untuk dana bagi hasil desa.

Sementara itu, porsi cadangan penyesuaian moneter pemerintah pusat dan teritorial yang diperoleh daerah untuk perkotaan adalah 5% sampai 10% dari penerimaan toko penyesuaian tahunan, yang terdiri dari bagi hasil pengeluaran dan aset normal, serta Aset Distribusi Keseluruhan (DAU) setelah dikurangi konsumsi. perwakilan. Penyelewengan dana oleh pihak-pihak yang seharusnya dipercaya oleh masyarakat dalam membangun desa agar lebih maju dan berkembang merupakan hal yang lumrah terjadi pada beberapa situasi penggunaan Alokasi Dana Desa. Di sinilah tugas daerah sebagai pengelola langsung menjadi sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dari tugas Pemerintah Rezim sebagai pemberi dana untuk terus memantau kemajuan pembangunan di kota.

Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa 70% Penugasan Aset Kota direncanakan untuk penguatan kawasan setempat dan 30% untuk penataan kota. Honorarium Tim Pelaksana Dana Desa (DD) serta penguatan kelembagaan dan kegiatan desa merupakan tujuan utama Dana Desa (DD) yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat desa. Tujuan tersebut antara lain perbaikan fasilitas umum dalam skala kecil, perbaikan lingkungan, dan perumahan. Sedangkan operasional Badan Permusyawaratan Desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa ditopang oleh penggunaan Dana Desa untuk penyelenggaraan pemerintahan (BPPMD, 2017). Karena sebagian besar Aset Kota diharapkan untuk daerah setempat, maka mulai dari proses penataan Aset Kota, pelaksanaan Aset Kota, hingga pengumumannya harus dilakukan sesuai sistem yang relevan. Sehingga Aset Kota ini dipercaya dapat membuat kejadian yang adil dan bermanfaat.

Berdasarkan observasi awal yang dilakukan, permasalahan yang ada pada pemanfaatan dana desa diantaranya adalah:

1. Tidak tepatnya perhitungan biaya penggunaan dana desa ditargetkan dan terealisasi, seperti (1) penyelenggaraan Cor Jalan Tani Lulun sebesar Rp100.000.000 terealisasi sebesar Rp 132.082.000, (2) penyelenggaraan Penyirangan Mata Air pada RT 01 sebesar Rp 5.000.000 terealisasi sebesar Rp 21.910.095, (Perubahan Rencana Anggaran Biaya Tahun Anggaran 2023) dari penjelasan tersebut ditemukan permasalahan yang muncul bahwa kesamaan antara target dengan realisasi penggunaan dana desa cenderung fluktuasi, hal ini cukup menandakan bahwa kemampuan aparat desa dalam penggunaan dana desa masih kurang matang. (*sumber dari RKP Desa tahun 2023*)
2. Adanya pelaksanaan RKP desa tahun 2022 yang masih belum terealisasi, seperti (1) Pembuatan Sumur Gali 2 unit, (2) pembuatan Jalan Usaha Tani Ladit Dasing, (3) penyelenggaraan Bedah Rumah untuk orang yang tidak mampu. (*observasi peneliti*)
3. Kurangnya pemeliharaan pada jalan usaha tani, dilihat banyaknya jalan yang masih rusak sehingga mempersulit masyarakat untuk melalui jalan tersebut. (*observasi peneliti*)

Hasil penelitian terdahulu ini mengacu pada penelitian Nova Sulastris tahun 2016 tentang efektivitas pengelolaan dana desa dalam upaya meningkatkan pembangunan fisik desa Lakapodo Watopute Kabupaten Muna. Penelitian ini menunjukkan bahwa pemberian otonomi kepada daerah untuk mengelola sumber daya secara optimal harus diikuti dengan pengawasan yang kuat. Pembangunan desa masih banyak bergantung pada pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat, namun dengan alokasi dana desa (ADD), desa dapat menjadi lebih sejahtera. Dalam kasus Desa Lakapodo Watopute, alokasi dana desa telah sesuai dengan proporsi yang diharuskan, dengan 30% untuk penyelenggaraan pemerintahan desa dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat. Hasil pembangunan sarana fisik dengan ADD tahun 2013 meliputi saluran air, plengsengan, pemasangan paving, dan renovasi kantor desa. Namun, pengelolaan ADD ini masih belum maksimal sesuai

dengan tujuan awalnya. Masalah yang muncul meliputi kurangnya koordinasi antar anggota tim pelaksana ADD dan keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban. (Sulastri, 2016)

Selain itu, penelitian Junaidi dari Sekolah Tinggi Administrasi Amuntai menunjukkan efektivitas pengelolaan dana desa di Desa Banyu Tajun Hulu, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan dana desa cukup baik, dengan indikator-indikator seperti ketepatan dalam melakukan perintah, menentukan tujuan, mengarahkan sasaran, dan menghitung biaya. Namun, terdapat faktor-faktor pendorong dan penghambat yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan dana desa, seperti kerjasama aparat desa dan kekurangan anggaran dana. (Junaidi, 2022)

Efektivitas adalah pencapaian yang diinginkan oleh suatu organisasi. Peneliti dapat menggunakan konsep dalam teori manajemen dan organisasi untuk memahami efektivitas. Efektivitas berasal dari bahasa Inggris yaitu *effectiveness* yang berarti efektivitas, keefektipan, kemujaraban, kemanjuran, dan kemampuan. Efektivitas terkait dengan kata *effect* dan *effective* yang berarti efek, akibat, kesan, kemanjuran, dampak, pengaruh, efektif, manjur, ampuh, berlaku, mujarab, berpengaruh, dan berhasil guna. Efektivitas melibatkan penggunaan efisiensi untuk mencapai tujuan yang direncanakan. Tingkat keberhasilan dan keterkaitan nilai juga berperan dalam efektivitas organisasi.

Pius A. Partanto dan M. Dahlan Al-Barry Efektivitas berasal dari kata “efek” yang artinya pengaruh yang ditimbulkan oleh sebab, akibat/dampak. Efektif yang artinya berhasil, sedangkan efektivitas menurut bahasa ketepatan guna, hasil guna, menunjang tujuan”. (Maarif, M. S. dan Kartika, 2014)

Robbins dalam buku *Organisation Theory: Structure, Design and Application* yang diterjemahkan oleh Udaya, menjelaskan bahwa efektivitas dapat didefinisikan sebagai tingkat pencapaian organisasi atas tujuan jangka pendek (tujuan) dan jangka panjang (cara). Pemilihan itu mencerminkan konstitusi strategis, minat mengevaluasi, dan tingkat kehidupan organisasi.“

Siagian memberikan pengertian tentang efektivitas berkaitan dengan pelaksanaan suatu pekerjaan, yaitu: ”Penyelesaian pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditetapkan. Artinya apakah pelaksanaan suatu tugas dinilai baik atau tidak, terutama menjawab pertanyaan bagaimana cara melaksanakannya, dan berapa biaya yang dikeluarkan untuk itu.” (Wijaya, 2014)

Dalam penelitian, ditemukan beberapa indikator efektivitas (Ambarwati, 2022). Indikator tersebut meliputi:

- 1) Ketepatan waktu: Menentukan keberhasilan atau kegagalan aktivitas organisasi.
- 2) Ketepatan perhitungan biaya: Menggunakan biaya dengan tepat.
- 3) Ketepatan dalam pengukuran: Mengukur kegiatan dengan akurat.
- 4) Ketepatan dalam menentukan pilihan: Menetapkan pilihan terbaik melalui proses yang tepat.
- 5) Ketepatan berpikir: Berpikir dengan benar untuk mencapai kesuksesan.
- 6) Ketepatan dalam melakukan perintah: Memberikan perintah yang jelas kepada bawahan.
- 7) Ketepatan dalam menentukan tujuan: Menetapkan tujuan yang tepat dan jelas.
- 8) Ketepatan sasaran: Menetapkan sasaran yang tepat dan tidak menghambat pelaksanaan kegiatan organisasi.

## METODE

Lokasi dalam penelitian ini di Kecamatan Parangin Selatan Kabupaten Balangan dengan studi kasus Desa Murung Abuin dan Desa Baruh Bahinu Dalam. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini

menggunakan teknik *purposive sampling* yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan atau kriteria-kriteria tertentu dengan jumlah informan sebanyak 10 orang, teknik analisis yang digunakan yakni reduksi, penyajian data dan penarikan kesimpulan. (Sugiyono, 2016)

## PEMBAHASAN

### Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Fisik Di Desa Bangkirayen Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur

#### 1. Ketepatan Waktu

##### a. Perencanaan Waktu Yang Ditetapkan

Perencanaan pembangunan fisik desa tergolong cukup baik sesuai dengan RKPDes ataupun tahapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adapun kendala yang dihadapi memang tidak dapat dihindari dikarenakan keterbatasan anggaran ataupun sumber daya manusia kurang mampu membuat perencanaan yang optimal.

##### b. Kesesuaian Waktu Penyelesaian

Kesesuaian waktu pembangunan di Desa Bangkirayen memang kurang baik dikarenakan kondisi cuaca seperti hujan yang tidak menentu yang menyebabkan proses pembangunan menjadi terhambat seperti pembuatan Jalan Usaha Tani Ladit Dasing ataupun pemeliharaan jalan lainnya.

#### 2. Ketepatan Perhitungan Biaya

##### a. Perencanaan Perhitungan Biaya

Penggunaan biayanya cukup dan layak untuk difokuskan guna mendukung kemajuan dan penguatan wilayah setempat. Dalam situasi ini, hal ini berupa penyediaan kebutuhan seperti pangan, sandang, dan papan, serta layanan kesehatan dasar, infrastruktur, dan pendidikan.

##### b. Ketepatan Pemanfaatan Biaya

Penggunaan biayanya cukup dan layak untuk difokuskan guna mendanai kemajuan dan penguatan daerah. Dalam situasi ini, hal ini berupa penyediaan kebutuhan seperti pangan, sandang, dan papan, serta layanan kesehatan dasar, infrastruktur, dan pendidikan.

#### 3. Ketepatan Dalam Pengukuran

##### a. Pengukuran Kebutuhan Pembangunan

Proses penyusunan RAB merupakan rangkaian kegiatan yang dimulai dengan menentukan desain (gambar rencana), melakukan pengukuran lapangan dan survey harga dan lain-lain namun masih kurang baik dikarenakan adanya selisih perhitungan seperti penyelenggaraan Cor Jalan Tani Lulun sebesar Rp100.000.000 terealisasi sebesar Rp 132.082.000 atau penyelenggaraan Penyiringan Mata Air pada RT 01 sebesar Rp 5.000.000 terealisasi sebesar Rp 21.910.095.

##### b. Ketepatan Pengukuran Pembangunan

Pengukuran kebutuhan pembangunan fisik masih kurang tepat dikarenakan dalam realisasinya masih terdapat selisih atau kekurangan dana seperti penyelenggaraan Cor Jalan Tani Lulun sebesar Rp100.000.000 terealisasi sebesar Rp 132.082.000 atau penyelenggaraan Penyiringan Mata Air pada RT 01 sebesar Rp 5.000.000 terealisasi sebesar Rp 21.910.095.

#### 4. Ketepatan Dalam Menentukan Pilihan

##### a. Proses Penentuan Pilihan Pembangunan

Proses penentuan pilihan pembangunan fisik desa tergolong cukup baik sesuai dengan RKPDes ataupun tahapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adapun kendala yang

dihadapi memang tidak dapat dihindari dikarenakan keterbatasan anggaran ataupun sumber daya manusia yang kurang mampu membuat perencanaan yang optimal.

## **b. Ketepatan Pilihan**

Keputusan penggunaan dana desa sudah tepat dan dianggap sebagai prioritas yang cukup tinggi untuk membiayai pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Dalam situasi ini, hal ini berupa penyediaan kebutuhan seperti pangan, sandang, dan papan, serta layanan kesehatan dasar, infrastruktur, dan pendidikan.

## **5. Ketepatan Berpikir**

### **a. Rapat Tukar Pendapat**

Rapat tukar pendapat dinilai cukup baik dilaksanakan melalui musrenbang untuk penyusunan perencanaan pembangunan desa dan melibatkan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pendamping Desa dan unsur masyarakat.

## **6. Ketepatan dalam melakukan perintah**

### **a. Ketepatan perintah Kepala Desa terhadap aparat desa**

Kepala Desa dinilai cukup baik dengan memberikan instruksi sesuai dengan peraturan yang berlaku mencakup monitoring ataupun pembinaan kegiatan dilapangan dalam proses pembangunan fisik desa.

## **7. Ketepatan Dalam Menentukan Tujuan**

### **a. Tujuan yang jelas**

Tujuan dalam pembangunan fisik desa tergolong cukup baik sesuai dengan RKPDes ataupun tahapan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adapun kendala yang dihadapi memang tidak dapat dihindari dikarenakan keterbatasan anggaran ataupun sumber daya manusia yang kurang mampu membuat perencanaan yang optimal.

### **b. Tujuan yang tepat**

Jumlah pengurus cagar kota sudah memadai dan layak dijadikan fokus pendanaan perbaikan dan penguatan kawasan setempat. Dalam situasi ini, hal ini berupa penyediaan kebutuhan seperti pangan, sandang, dan papan, serta layanan kesehatan dasar, infrastruktur, dan pendidikan.

## **8. Ketepatan Sasaran**

### **a. Sasaran yang ingin dicapai**

Sasaran yang ingin dicapai dalam pengelolaan dana desa adalah untuk pembangunan fisik secara optimal seperti pembangunan Jalan Usaha Tani, Penyiringan Mata Air dan lain sebagainya namun memang belum dapat terealisasi secara menyeluruh karena keterbatasan anggaran.

### **b. Ketepatan pengukuran pembangunan**

Ketepatan sasaran pembangunan desa tergolong kurang baik dikarenakan adanya beberapa perencanaan yang belum dapat terealisasi seperti pembangunan Jalan Usaha Tani, Penyiringan Mata Air dan lain sebagainya.

## **Faktor Yang Mempengaruhi.**

### **1. Faktor Penghambat**

#### **a. Belum efektifnya perencanaan Pembangunan Fisik Desa**

Kesesuaian waktu pembangunan di Desa Bangkirayen memang kurang baik dikarenakan kondisi cuaca seperti hujan yang tidak menentu yang menyebabkan proses pembangunan menjadi terhambat seperti pembuatan Jalan Usaha Tani Ladit Dasing ataupun pemeliharaan jalan lainnya.

## **b. Rendahnya Sumber Daya Manusia Aparatur Desa**

Sumber Daya Manusia para Aparat Desa masih rendah dari aspek tingkat Pendidikan dan kemampuan penyusunan rencana, hal ini menunjukkan bahwa memang untuk Menyusun Rancangan Anggaran Biaya harus mempunyai kemampuan dan wawasan yang memadai sehingga sesuai dengan pemanfaatan biaya dalam realisasinya.

## **c. Terbatasnya Anggaran untuk pembangunan fisik Desa**

Keterbatasan anggaran tersebut dilihat dari beberapa pembangunan fisik yang belum dapat terealisasi pada tiap tahun anggaran dana desa, sehingga tertunda dan dilanjutkan pada anggaran berikutnya, selain itu Dana Desa ini pemanfaatannya tidak hanya pembangunan fisik tetapi berbagai aspek lainnya.

## **2. Faktor Pendorong**

### **a. Kerjasama yang baik antar Aparat Desa dengan Masyarakat Desa**

Kerjasama yang dilakukan adalah melalui pembinaan program kerja maupun kegiatan lapangan seperti Musrenbang atau tukar pendapat mengenai perencanaan pembangunan desa.

### **b. Tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan fisik Desa**

Tingginya partisipasi Masyarakat Desa Bangkirayen dilihat dari tingginya antusias dalam pembangunan desa hal tersebut ditunjukkan dengan partisipasi masyarakat yang tinggi dalam membantu menyumbangkan tenaganya dan gotong royong.

## **SIMPULAN**

1. Efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Fisik di Desa Bangkirayen Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur dinilai kurang efektif dilihat dari aspek Pertama) ketepatan waktu meliputi Perencanaan waktu yang ditentukan dinilai cukup baik, kemudian Kesesuaian waktu penyelesaian dinilai kurang baik karena ada beberapa pembangunan di desa yang tidak selesai pada waktunya, Kedua) Ketepatan perhitungan biaya meliputi Perencanaan perhitungan biaya dinilai kurang baik dikarenakan adanya selisih anggaran atau kekurangan dana dalam realisasinya, kemudian Ketepatan pemanfaatan biaya cukup baik dan sesuai dengan prioritas dan kebutuhan pembangunan desa, Ketiga) Ketepatan dalam pengukuran meliputi Pengukuran kebutuhan pembangunan dinilai kurang baik dikarenakan saat realisasinya terjadi selisih atau kekurangan dana, kemudian Ketepatan pengukuran pembangunan dinilai kurang baik dikarenakan dalam realisasinya masih terdapat selisih atau kekurangan dana seperti penyelenggaraan Cor Jalan Tani Lulun sebesar Rp100.000.000 terealisasi sebesar Rp 132.082.000 atau penyelenggaraan Penyirangan Mata Air pada RT 01 sebesar Rp 5.000.000 terealisasi sebesar Rp 21.910.095, Keempat) Ketepatan dalam menentukan pilihan meliputi Proses penentuan pilihan pembangunan dinilai cukup baik cukup baik meliputi Penyusunan perencanaan pembangunan Desa melalui musyawarah Desa, kemudian Ketepatan pilihan cukup baik untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat dan lain sebagainya sesuai dengan peraturan yang berlaku, Kelima) Ketepatan berpikir meliputi Rapat tukar pendapat dinilai cukup baik melalui musrenbang untuk penyusunan perencanaan pembangunan desa dan melibatkan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Pendamping Desa dan unsur masyarakat, Keenam) Ketepatan dalam melakukan perintah meliputi Ketepatan perintah Kepala Desa terhadap aparat desa dengan memberikan instruksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, Ketujuh) Ketepatan dalam menentukan tujuan meliputi tujuan yang jelas dinilai cukup baik mencakup Identifikasi masalah dan potensi desa, Penetapan visi dan misi pembangunan desa,

Penyusunan rencana strategis pembangunan desa, Penyusunan rencana kerja dan Pelaksanaan dan evaluasi, kemudian tujuan yang tepat cukup baik untuk pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan Kedelapan) Ketepatan Sasaran meliputi Sasaran yang ingin dicapai dinilai kurang baik karena belum dapat terealisasi secara menyeluruh dikarenakan ada pembangunan yang tidak dapat terealisasi seperti Pembuatan Sumur Gali 2 unit, pembuatan Jalan Usaha Tani Ladit Dasing, dan penyelenggaraan Bedah Rumah untuk orang yang tidak mampu, Ketepatan pengukuran pembangunan dinilai kurang baik dikarenakan adanya beberapa perencanaan yang belum dapat terealisasi seperti pembangunan Jalan Usaha Tani, Penyirangan Mata Air dan lain sebagainya.

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi Efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Fisik di Desa Bangkirayen Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur meliputi faktor penghambat yakni belum efektifnya perencanaan Pembangunan Fisik Desa dilihat dari tidak tepatnya waktu penyelesaian pembangunan dikarenakan cuaca yang kurang mendukung serta anggaran yang kurang dihitung dengan tepat sehingga terjadi kekurangan anggaran pembangunan dan Rendahnya Sumber Daya Manusia Aparatur Desa yang diketahui rata-rata pendidikannya adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), dan terbatasnya Anggaran untuk pembangunan fisik Desa, selanjutnya faktor pendorong meliputi Kerjasama yang baik antar Aparat Desa dengan Masyarakat Desa melalui kegiatan perencanaan untuk penyusunan program kerja sehingga pelaksanaan pengelolaan Dana Desa menjadi lebih teratur dan tingginya partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa.

Agar efektivitas pengelolaan Dana Desa dalam Pembangunan Fisik di Desa Bangkirayen Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur terlaksana secara optimal, disarankan kepada:

1. Kepala Desa Bangkirayen Kecamatan Awang Kabupaten Barito Timur lebih aktif dalam memberikan pengawasan kegiatan pembangunan fisik desa serta lebih aktif dalam menggali potensi desa untuk pembangunan prioritas desa.
2. Aparat Desa agar aktif menjaring aspirasi masyarakat desa agar dapat menjadi usulan pembangunan desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ambarwati, A.R. dkk (2022) *Pengelolaan Dana Desa*. Bandung: CV. Widina Media Utama.
- Junaidi (2022) *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Pembangunan Di Desa Banyu Tajun Hulu Kecamatan Sungai Pandan Kabupaten Hulu Sungai Utara*. Sekolah Tinggi Administrasi (STIA) Amuntai.
- Maarif, M. S. dan Kartika, L. (2014) *Manajemen pelatihan upaya mewujudkan kinerja unggul dan pemahaman employee engagement*. Bogor: PT Penerbit IPB Press.
- Sugiyono (2016) *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sulastri, N. (2016) *Efektivitas Pengelolaan Dana Desa dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Fisik Desa Lakapodo Watopute Kabupaten Muna*.
- Wijaya, I.I. (2014) *Prilaku Organisasi*,. Bandung: Sinar Baru.